

PEDOMAN

PEMUKTAHIRAN KURIKULUM



**INSTITUT INFORMATIKA dan BISNIS
DARMAJAYA**

KATA PENGANTAR

Kurikulum merupakan keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Menyadari akan hal ini, maka Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya memprogramkan secara khusus kegiatan yang mampu mendukung dan mendorong pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Mengingat penyusunan kurikulum merupakan hak otonomi dari perguruan tinggi, ketersediaan buku rujukan dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum mutlak diperlukan. Untuk usaha inilah disusun buku **Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Informatika Dan Bisnis (IIB) Darmajaya**.

Buku pedoman ini berisi serangkaian bab yang dimulai dengan hal yang melatarbelakangi perubahan kurikulum dan proses menuju perubahan ke Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berkualitas, dan arah pengembangan Kurikulum Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Teknik penyusunan *Program Learning Outcome (PLO)*, *Course Learning Outcome (CLO)*, dan teknik menentukan besaran SKS dan pengkodean disertai contoh-contoh konkrit.

Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan Pedoman yang realistis tentang Kurikulum di Perguruan Tinggi berlandaskan pada SN-DIKTI dan KKNI. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh program studi yang menyusun kurikulum.

Bandar Lampung, September 2015

Tim penyusun

SAMBUTAN REKTOR

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), maka Rektor Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya menerbitkan buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya. Buku ini merupakan Pedoman ringkas yang dapat memfasilitasi program studi di Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya dalam upaya penyusunan kurikulum yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI.

Buku ini dirancang sebagai manual penyusunan kurikulum, untuk mengarahkan kepada setiap program studi di Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya agar dapat menyusun kurikulum yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI. Dengan adanya buku ini diharapkan program studi dapat melakukan refleksi dan *re-invent* melalui *co-creation* bersama sivitas akademika dan *stakeholders*. Melalui pendekatan refleksi dan *re-invent* diyakini bahwa kurikulum yang disusun oleh program studi dapat diimplementasikan dan memenuhi capaian pembelajaran sesuai *scientific vision* dan kebutuhan dunia kerja.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya.

Akhir kata, walaupun masih ada kekurangan dalam buku ini, diharapkan dapat digunakan sebagai landasan perubahan yang sangat bermanfaat menuju pendidikan berkualitas. Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh sivitas akademika Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya dan *stakeholders* pendidikan tinggi.

Bandar Lampung, September 2015
Rektor Institut Informatika Dan Bisnis (IIB) Darmajaya

Dr. Andi Desfiandi, S.E.,M.A



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK.0361/DMJ/REK/WRI/IX-15

Tentang

PEDOMAN PEMUKTAHIRAN KURIKULUM
PADA SETIAP PROGRAM STUDI
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS (IIB) DARMAJAYA

- Menimbang :
1. Bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, maka perlu ditetapkan kurikulum pada setiap program studi di IIB Darmajaya.
 2. Bahwa kurikulum yang ditetapkan pada satu jenjang pendidikan harus senantiasa sesuai dengan kompetensi keilmuan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
 3. Bahwa pada kurikulum yang sebelumnya masih dirasa ada beberapa mata kuliah yang kurang mendukung untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman.
 4. Bahwa untuk itu diperlukan perubahan kurikulum pada setiap program studi secara berkala dengan ketentuan perubahan kurikulum tersebut diatur didalam suatu dokumen yang menjadi acuan untuk setiap perangkat program studi melakukan
 5. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas, maka perlu diterbitkan surat keputusan Rektor mengenai pedoman pemuktahiran kurikulum pada setiap program studi institut informatika dan bisnis (IIB) Darmajaya.
- Mengingat :
1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/0?2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengesahkan Pedoman Pemuktahiran Kurikulum Pada Setiap Program Studi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua : Hal – hal yang belum diatur di dalam surat keputusan ini akan ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : **Bandar Lampung**
Pada tanggal : **7 September 2015**

Rektor IIB Darmajaya,


Dr. Andi Desfiandi, S.E., MA
NIK. 00030797

- Tembusan :
1. Wakil Rektor 1,2,3
 2. Dekan FEB, Dekan FILKOM
 3. Seluruh Magur dan Kaprodi
 4. Arsp



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IBI DARMAJAYA
NOMOR : SK.028/DMJ/REK/WRI/I-15

Tentang

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
INFORMATICS AND BUSINESS INSTITUTE DARMAJAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, maka perlu ditetapkan kurikulum pada setiap program studi di IIB Darmajaya.
 2. Bahwa kurikulum yang ditetapkan pada satu jenjang pendidikan harus senanibasa sesuai dengan kompetensi keilmuan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
 3. Bahwa pada kurikulum yang sebelumnya masih dirasa ada beberapa mata kuliah yang kurang mendukung untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman.
 4. Bahwa untuk itu diperlukan perubahan kurikulum pada setiap program studi secara berkala dengan ketentuan perubahan kurikulum tersebut diatur didalam suatu dokumen yang menjadi acuan untuk setiap perangkat program studi melakukan.
 5. Bahwa untuk menyusun pedoman penyusunan kurikulum perlu dibentuk suatu tim penyusun.
 6. Bahwa berdasarkan poin 5 diatas, maka perlu diterbitkan surat keputusan Rektor mengenai tim penyusun pedoman penyusunan kurikulum pada institut informatika dan bisnis (IIB) Darmajaya.
- Mengingat** :
1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/0/2008 tertanggal 20 Agustus 1008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
1. Menetapkan nama – nama yang tercantum di dalam dalam Surat Keputusan ini adalah sebagai **"TIM PENYUSUN PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM INFORMATICS AND BUSINESS INSTITUTE DARMAJAYA"**.
- Kedua** :
1. Diharapkan kepada nama – nama tersebut agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan tetap mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Ketiga** :
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : **Bandar Lampung**
pada tanggal : **15 Januari 2015**

Rektor IBI Darmajaya,



Dr. Andi Desfiandi, S.E., MA
NIK. 00030797

- Terbaca :**
1. Wakil Rektor 1,2,3
 2. Dekan IIB, Dekan FIKDH
 3. Rektuh Kapur dan Kapresid
 4. KUSDM
 5. ybt
 6. Atsp



Lampiran : Surat Keputusan Rektor IIB Darmajaya
Tentang : Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Kurikulum Informatics and Business Institute Darmaya
Nomor : SK.026/DM/REK/WRI/I-2015
Tanggal : 15 Januari 2015

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM INFORMATICS AND BUSINESS INSTITUTE DARMAJAYA

Pengarah : Dr. Andi Desfiandi, S.E., M.A
Penanggungjawab : Dr. RZ. Abdul Aziz, S.T., M.T
Ketua : Nurjoko, S.Kom., M.T.I
Anggota : 1. Abdi Darmawan, S.T., M.T.I
2. Andri Winata, S.E., M.Sc
3. Zaidir Jamal, S.T., M.Eng
4. Yuni Arkhiansyah, S.Kom., M.Kom
5. Aswin, S.E., M.M
6. Anik Irawati, S.E., M.Si
7. Nursiyanto, S.Kom., M.T.I



Ditandatangani di : Bandar Lampung
pada tanggal : 15 Januari 2015
Rektor IBI Darmajaya

Dr. Andi Desfiandi, S.E., MA
NIK. 00030797

Tersusun 1
1. Wakil Rektor 1,2,3
2. Dekan FEB, Dekan FKUDM
3. Sekuriti Rector dan Kaprad
4. KUSDM
5. ybs
6. Arsip

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN REKTOR	iii
SK PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM	iv
SK TIM PENYUSUN PEDOMAN KURIKULUM	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI	
1.1 Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia	1
1.2 Landasan Pemikiran Kurikulum Pendidikan Tinggi	2
1.3 Arah Kebijakan Kurikulum Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya	6
 BAB II PARADIGMA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI	
2.1 KKNi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi	9
2.2 KKNi sebagai Tolak Ukur	9
2.3 Capaian Pembelajaran sebagai bahan Utama Penyusunan KPT	11
 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI	
3.1 Penyusunan Struktur Kurikulum Program Studi	14
3.2 Penetapan Capaian Pembelajaran	17
3.3 Unsur dalam Capaian Pembelajaran	17
3.4 Tahap Penyusunan Capaian Pembelajaran	19
3.5 Jenis Formulasi CP	20
3.6 Alur Penyusunan CP	21
3.7 Langkah Menentukan Profil	22
3.8 Alur Menyusun Pernyataan CP	23
3.9 Rujukan Penyusunan Capaian Pembelajaran	25
 BAB IV PENYUSUNAN MATA KULIAH	
4.1 Penetapan Keluasan dan Kedalaman Pengetahuan	26
4.2 Pengertian Standar Isi	29
4.3 Penetapan Beban Belajar Mata Kuliah dan SKS	30

4.4 Ketentuan Khusus Kurikulum IIB Darmajaya	34
4.5 Teknik Menyusun Kode Mata Kuliah	35
BAB V RANCANGAN PEMBELAJARAN	
5.1 Model Perancangan Pembelajaran.....	37
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PEMUTAHIRAN KURIKULUM	
6.1 Metode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran.....	42
6.2 Sistem Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.....	44
6.3 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.....	45
LAMPIRAN	

BAB I

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

1.1 Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) *Input*; (2) *Proses*; (3) *Output*; dan (4) *Outcomes*. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.

Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Dalam perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masing-masing. Namun, proses penjaminan mutu secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil PT saja. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang

berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input). Siklus ini harus dievaluasi dan diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan (Gambar1-1).

1.2 Landasan Pemikiran Kurikulum Pendidikan Tinggi

Sebelum tahun 2000 kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu mengindikasikan berakhirnya tugas satu perangkat kurikulum. Selain itu, berorientasi kepada rencana strategis PT yang memuat visi dan misi PT juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan internal PT sendiri. Apalagi pada situasi global seperti saat ini, dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (pre-millennium era) perubahan IPTEKS yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca-millennium. Jika dipahami secara mendalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnya proses di dalam PT perlu untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan kurikulum PT di Indonesia.



Gambar 1-1: Alur Sistem Pendidikan Tinggi

Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTS) oleh Pemerintah RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. Berbagai parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. *Roadmap* atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja profesional antar negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan *roadmap* tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk berbagai profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA adalah: (1) *engineers*; (2) *architect*; (3) *accountant*; (4) *land surveyors*; (5) *medical doctor*; (6) *dentist*; (7) *nurses*, dan (8) *labor in tourism*. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, juga sukar dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Tidak adanya standar kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi sebuah tonggak sejarah baru (*milestone*) bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bersaing di tingkat global. Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan:

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*). Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negaranegara lain dapat menggunakannya sebagai Pedoman untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia diawali tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui *concept the four pillars of education*, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together* (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari Kurikulum Berbasis Isi (KBI) ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. KBK terdiri atas kurikulum inti dan institusional, mencakup kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Implementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi utama melalui kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum di perguruan tinggi sejak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama **Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)**. Pada Tabel 1-1 di bawah ini menjelaskan perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu.

Tabel 1-1. Perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari waktu ke waktu

KBI (1994)	KBK (2000/2002)	KPT (2012)
Kurikulum Nasional (Kepmendikbud Nomor: 056/U/1994)	Kurikulum Inti dan Institusional (Kepmendikbud Nomor: 232/U/2000 dan 045/U/2002)	Kurikulum Pendidikan Tinggi (UUPT Nomor: 12/2012 dan KKNI – Perpres Nomor 8/2012)
<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan penguasaan ipteks • Tidak merumuskan kemampuannya • Menetapkan MK wajib (100 – 110) dari 160 sks (S1) 	<p>Mengutamakan pencapaian kompetensi</p> <p>Tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai</p> <p>Penetapan kompetensi utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran • Terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, pengembangan keilmuan, kewenangan dan tanggungjawabnya. • Perumusan capaian pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan • Hasil kesepakatan prodi sejenis.

1.3 Arah Kebijakan Kurikulum Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya

Rujukan penyusunan kurikulum harus mengacu kepada berbagai kebijakan maupun standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar pendidikan tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penerbitan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menuntut kurikulum pendidikan tinggi juga merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan.

Kata kunci yang mengkaitkan antara kurikulum dengan KKNI adalah capaian pembelajaran (CP) dan kualifikasi. Pengemasan CP ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyetaraan kualifikasi dan rekognisi antara tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan. Di samping itu,

pengemasan CP ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara regional maupun secara internasional.

Pengembangan kurikulum Program Studi di Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya didasarkan atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut ini:

1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi IIB Darmajaya Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Bisnis.
2. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Mutu IIB Darmajaya yang terdiri dari kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu.
3. Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (*living document*) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KKNI.
4. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli, *stakeholders* (pemangku kepentingan), Asosiasi Bidang Studi, dan civitas akademika program studi untuk mendapatkan masukan.
5. Penyusunan dan perbaikan kurikulum dilakukan serentak di setiap Program Studi dan diharapkan penerapannya juga dilakukan secara serentak.
6. Pengembangan kurikulum didukung oleh Landasan Yuridis, Landasan Filosofi, dan Landasan Teoritis.
7. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Yuridis dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.
8. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Filosofi seperti idealisme, humanisme, esensialisme, parenialisme, dan rekonstruktivisme sosial.
9. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Teoritis didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan pragmatis.
10. IIB Darmajaya akan menyediakan dana pemutakhiran kurikulum kepada setiap prodi untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tersebut.

11. Setiap Prodi hanya menjalankan 1 kurikulum yang telah disahkan oleh Rektor IIB Darmajaya.
12. Implementasi kurikulum KKNI harus dilaksanakan paling lambat semester Ganjil 2015/2016.
13. Mata Kuliah wajib di IIB Darmajaya mengacu kepada ketetapan Rektor IIB Darmajaya, dan
14. Hal-hal teknis lainnya (seperti SKS, masa studi, dan lainnya) mengacu kepada Pedoman Kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor IIB Darmajaya.

BAB 2

PARADIGMA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

2.1 KJNI dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

KJNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KJNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki Negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KJNI ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KJNI juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia.

Fungsi komprehensif ini menjadikan KJNI berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada kurikulum pendidikan tinggi.

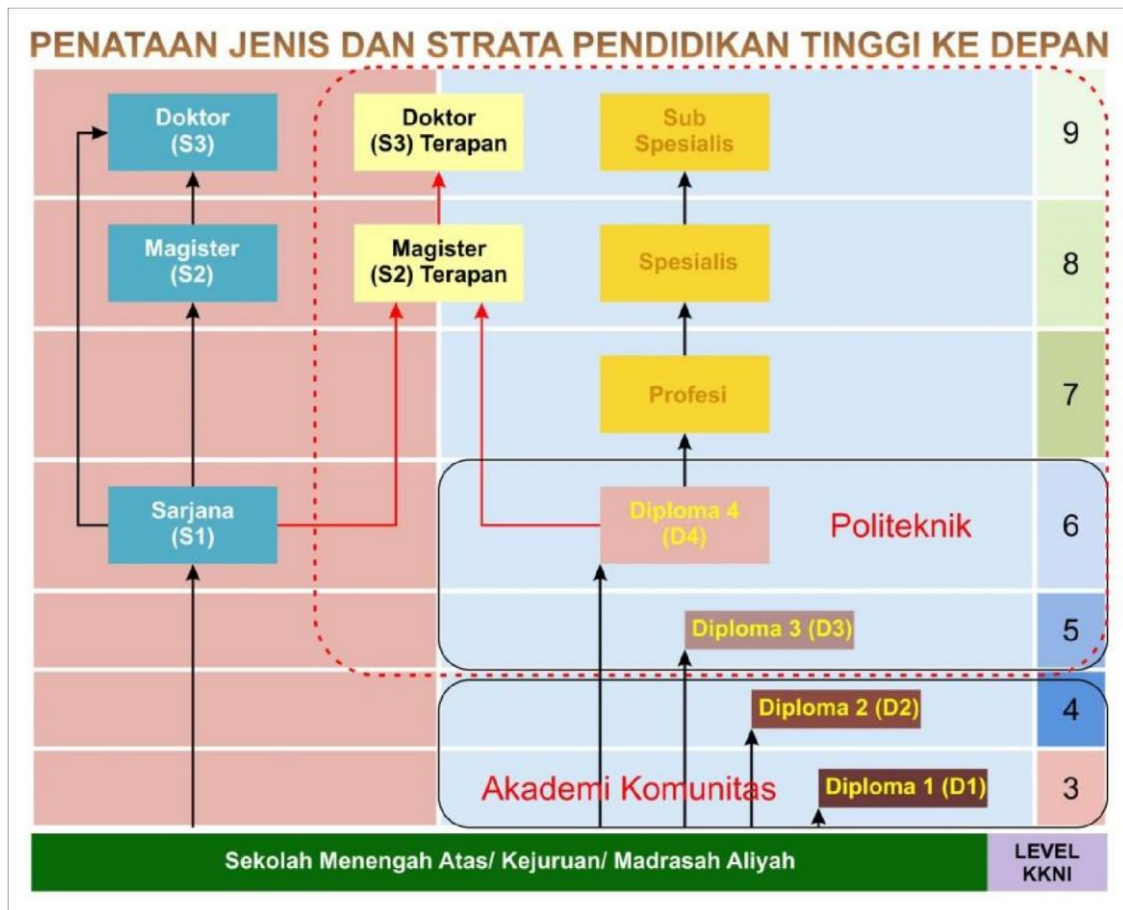
2.2 KJNI Sebagai Tolok Ukur

Pergeseran wacana penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke KPT memiliki beberapa alasan yang penting, sebagai berikut:

- a) Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang. Hal ini sesuai dengan kaidah dari kurikulum itu sendiri yang terus berkembang menyesuaikan pada kondisi terkini dan masa mendatang.
- b) KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh perwakilan penyelenggara program studi yang akan disusun kurikulumnya. Kesepakatan ini umumnya tidak sepenuhnya

merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan pengembang kurikulum menyepakati kompetensi lulusan yang kedalaman atau jenjang capaiannya berbeda dengan pengembang kurikulum lainnya walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.

- c) Ketidadaan parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Artinya, tidak ada yang dapat menjamin apakah kurikulum program D4 misalnya lebih tinggi dari program D3 pada program studi yang sama jika yang menyusun dari kelompok yang berbeda.
- d) KKNi memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) sampai jenjang 9 (tertinggi). Setiap jenjang KKNi bersepadan dengan jenjang Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah jenjang 3 untuk D1, jenjang 4 untuk D2, jenjang 5 untuk D3, jenjang 6 untuk D4/S1, jenjang 7 untuk profesi (setelah sarjana), jenjang 8 untuk S2, dan jenjang 9 untuk S3. Kesepadanan ini diperlihatkan pada Gambar 2-1.



Gambar 2-1: Penataan Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi

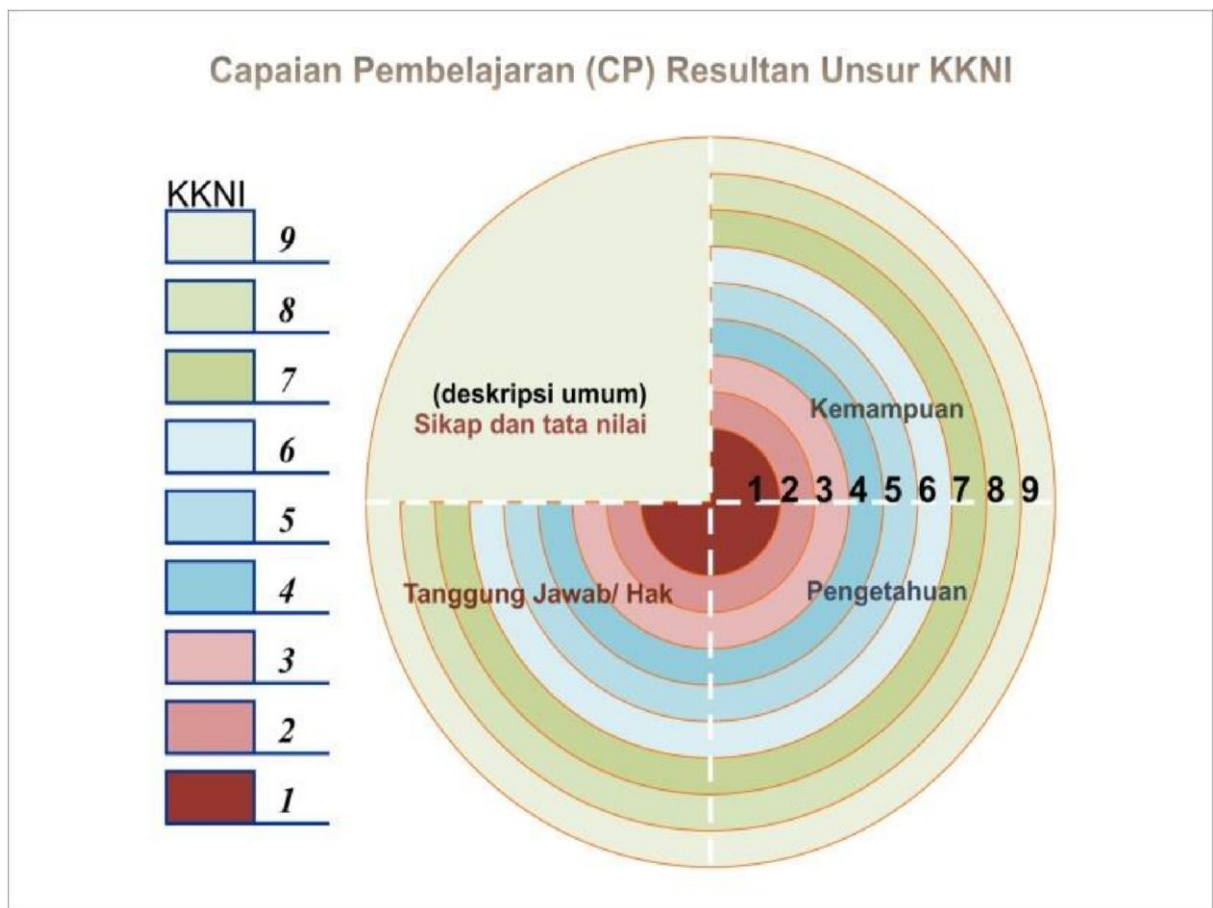
- e) CP pada setiap jenjang KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Masing-masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan jenjang dari CP sesuai dengan jenjang program studi.
- f) KPT merupakan bentuk pengembangan dari KBK, menggunakan jenjang kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP untuk bahan penyusun kurikulum suatu program studi.
- g) Perbedaan utama KPT dengan KBK terletak pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

2.3 Capaian Pembelajaran sebagai Bahan Utama Penyusunan KPT

Akuntabilitas penyusunan KPT dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya KKNI sebagai tolok ukur dalam penyusunan CP. Secara khusus kewajiban

menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNi dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni: setiap program studi wajib menyusun deskripsi CP minimal mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi. Dengan demikian semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNi sebagai tolok ukurnya.

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur CP mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling terkait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan bahwa siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus **memiliki sikap dan tata nilai keIndonesiaan**, padanya harus **dilengkapi dengan kemampuan** yang tepat dan **menguasai/didukung oleh pengetahuan** yang sesuai, maka padanya **berlaku tanggung jawab** sebelum dapat menuntut/**mendapat hak**-nya. Kesatuan unsur CP tersebut digambarkan seperti Gambar 2-2.



Gambar 2-2: Capaian Pembelajaran Sesuai KKNi

Apabila unsur-unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam penyusunan kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengkonstruksi dirinya menjadi pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang kuat dan bersih.

BAB 3

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

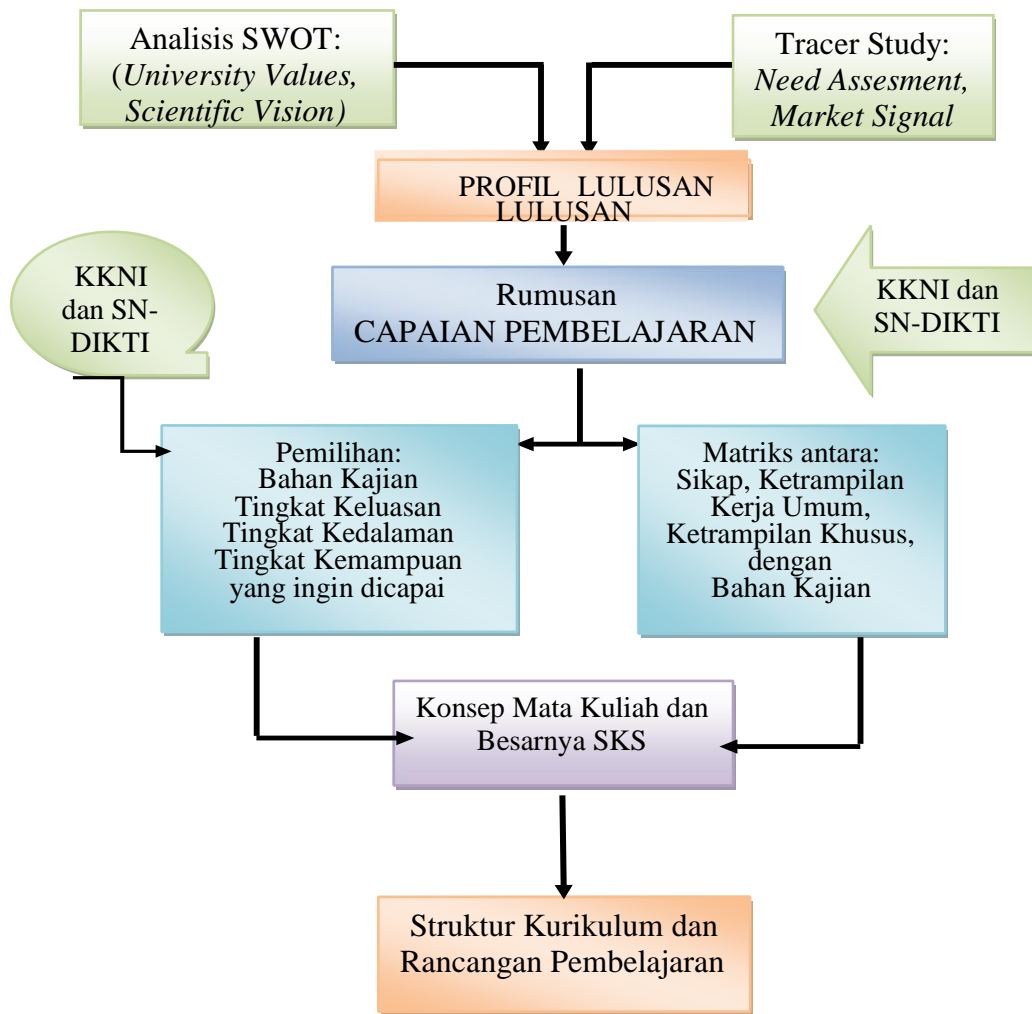
3.1 Penyusunan Struktur Kurikulum Program Studi

Pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester sering dikenal sebagai struktur kurikulum. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan penyusunan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah yang saling berhubungan ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Permasalahan yang sering muncul adalah siapa yang harus membuat hubungan antar mata kuliah antar semester. Jika mahasiswa, mereka belum memiliki kompetensi untuk memahami keseluruhan kerangka keilmuan tersebut. Jika dosen, tidak ada yang menjamin terjadinya kaitan tersebut mengingat antara mata kuliah satu dengan yang lain diampu oleh dosen yang berbeda dan sulit dijamin adanya komunikasi yang baik antara dosen-dosen yang terlibat. Kelemahan inilah yang menyebabkan lulusan dengan model struktur serial ini kurang memiliki kompetensi yang terintegrasi. Sisi lain dari adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab terlambatnya kelulusan mahasiswa karena bila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal mereka harus mengulang di tahun berikutnya.

Adapun pendekatan struktur kurikulum model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel ini secara ekstrim sering dijumpai dalam model BLOK di program studi kedokteran. Model Blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok, sehingga sering pula disebut sebagai model MODULAR, karena terdiri dari beberapa modul/blok. Tetapi, struktur kurikulum paralel tidak

hanya dilaksanakan dengan model Blok, tetapi dapat juga dalam bentuk semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Sehingga setiap semester akan mengarah pada pencapaian kompetensi yang serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya.

Sebagai penutup dari rangkaian penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh setiap program studi, dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. Di dalam gambar tersebut tampak bahwa pada awal pengembangan kurikulum, program studi harus menetapkan capaian pembelajaran pendidikannya, yang dikenal dengan profil (peran mahasiswa). Dari peran inilah, capaian pembelajaran di setiap tahap pendidikan dapat diturunkan dengan lebih akuntabel dan reliabel. Maknanya, tidak ada program studi yang terlewat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam KKNI. Ketentuan dari penetapan capaian pembelajaran ini, diatur dalam standar kompetensi lulusan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan Kurikulum

Langkah berikutnya adalah menetapkan bahan kajian untuk dapat memenuhi ketercapaian dari capaian pembelajaran tersebut. Ketentuan dari penetapan bahan kajian ini, ditetapkan melalui standar isi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pola pengembangan yang sesuai dengan peraturan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini, akan menjamin keterwujudan kurikulum yang akuntabel terhadap KKNi, serta lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kualifikasi dari KKNi.

3.2 Penetapan Capaian Pembelajaran

Deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). Sebagaimana telah diungkapkan di bab sebelumnya, CP dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu. Unsur capaian pembelajaran mencakup: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling terkait dan juga membentuk hubungan sebab akibat.

Secara umum CP dapat memiliki beragam fungsi, diantaranya :

- a) Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi.
- b) Sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan.
- c) Sebagai kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
- d) Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Karena sifatnya yang multifungsi seperti di atas, maka sangat mungkin format deskripsi CP beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CP sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.

3.3 Unsur dalam Capaian Pembelajaran

Pengertian capaian pembelajaran menurut KKN (Perpres RI No. 8 Tahun 2012) adalah: internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Dalam SN-DIKTI salah satu yang terkait dengan pengertian termuat dalam salah satu standar yakni “standar kompetensi lulusan” yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 yang dituliskan sebagai berikut :
“Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan”.

Dimana **sikap** diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Dalam SN Dikti, unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.

- a) **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b) **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.



Gambar 3-2: Penetapan Capaian Pembelajaran menurut SN-DIKTI

Keterkaitan utama CP adalah pada diskriptor generik KKNI, hal ini sangat jelas dikarenakan definisi CP dinyatakan pertama kali dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dalam KKNI, CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang yang menyelesaikan suatu proses belajar baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. CP, dengan demikian akan mengidentifikasi unsur-unsur pencapaian belajar tersebut, sehingga dapat diidentifikasi jenjang atau derajatnya.

3.4 Tahap Penyusunan Capaian Pembelajaran

Menurut SN-DIKTI CP lulusan terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan unsur sikap dan ketrampilan umum yang merupakan bagian dari CP telah dirumuskan dalam SN-DIKTI sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Hasil rumusan CP dari forum atau program studi dikirim ke Direktorat Pembelajaran Kemristek-DIKTI, dan setelah diverifikasi oleh tim pakar, hasil akhir rumusan CP bersama rumusan CP program

studi yang lain akan dimuat dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan KemristekDIKTI. Penyusunan CP, secara substantif dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Bagi program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat mencari referensi rumusan CP lulusan dari program studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain.
2. Bagi program studi yang telah memiliki rumusan ‘kemampuan lulusannya’ dapat mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan CP pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.
3. Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan di SN-DIKTI sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai.

3.5 Jenis Formulasi CP

Ragam formulasi deskripsi CP dimungkinkan dikarenakan pernyataannya yang menyesuaikan dengan kefungsiannya. Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP justru harus rinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil yang dituju.

Sebagai penciri program studi, seringkali pernyataan CP dituntut untuk ringkas mungkin sehingga dapat saja dinyatakan dalam satu paragraf yang mencakup seluruh unsurnya. Pernyataan CP untuk kebutuhan pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menelusuri dari profil yang dituju dan mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. CP pada pengembangan kurikulum berpeluang lebih mudah dikembangkan.

Hasil penyusunan CP untuk mengembangkan kurikulum dapat dipergunakan sebagai perantara dalam menyusun CP untuk penciri program studi yang lebih ringkas. Polanya adalah dengan merekonstruksi diskripsi rinci pada CP kurikulum dengan melakukan filterisasi untuk mendapatkan substansi dari setiap pernyataan sehingga diperoleh kalimat atau paragraf yang konvergen.

3.6 Alur Penyusunan CP

Pola atau alur penyusunan CP, utamanya untuk referensi dalam menyusun dokumen kurikulum minimal mencakup :

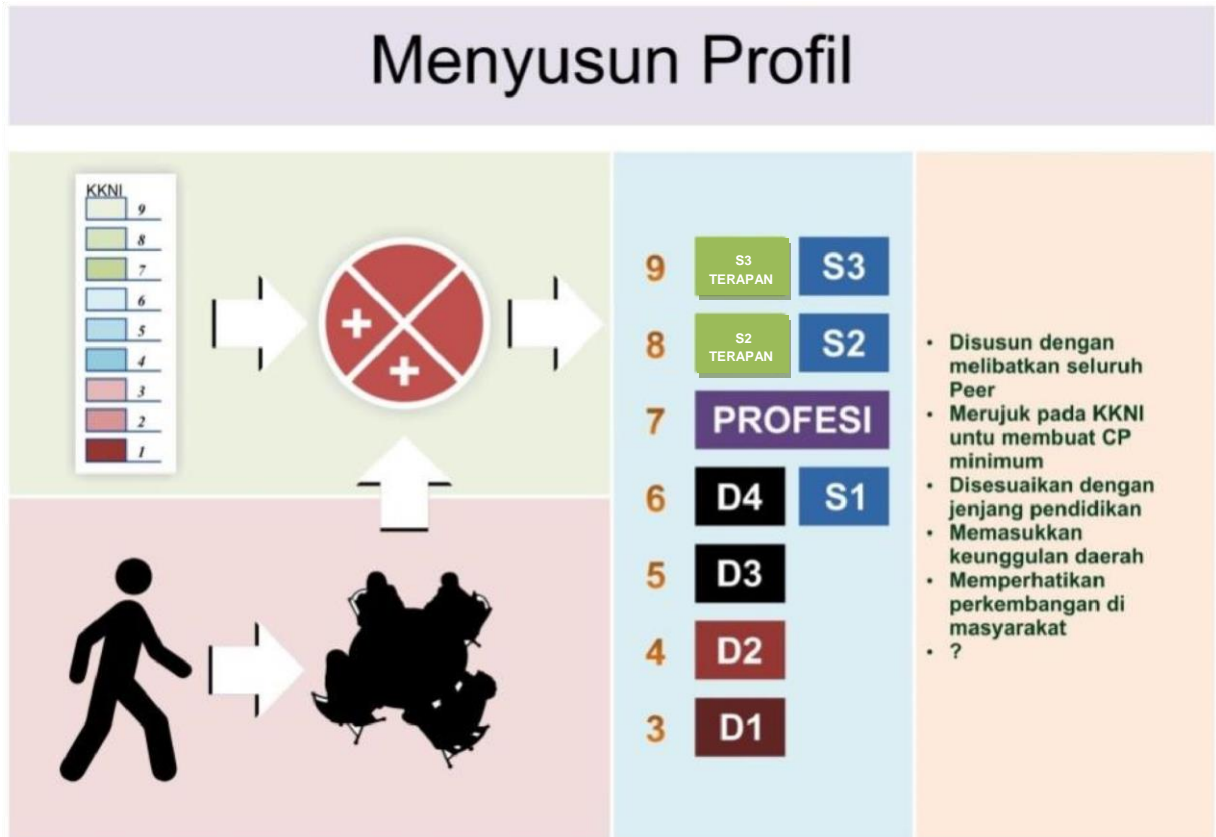
- a. Profil : postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI
- b. CP (Capaian Pembelajaran): dapat menyesuaikan dengan deskriptor KKNI atau unsur CP pada SN-DIKTI.
- c. Bahan Kajian: sebagai komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan.
- d. Mata kuliah: merupakan wadah sebagai konsekwensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.
- e. Metoda Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran.
- f. Metoda Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel.
- g. Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap.
- h. Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.

Penyusunan CP dengan pola di atas setidaknya membutuhkan langkah penentuan atau identifikasi profil lulusan. Profil dapat disepadankan dengan spesifikasi teknis dari hasil proses produksi, dalam hal ini adalah proses pembelajaran pada institusi pendidikan. Dengan demikian, pendeskripsian profil

menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam menyusun CP. Tidak akan ada CP yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil terlebih dahulu.

3.7 Langkah Menentukan Profil

Profil lulusan suatu program studi dapat disusun secara praktis dengan mengikuti alur sebagai berikut:



Gambar 3- 7: Langkah Penyusunan Profil Lulusan

Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis/asosiasi program studi, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Dalam penyusunan profil keterlibatan dari *stake holders* juga akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan lulusannya. Hal ini menjamin mutu dari profil lulusan.

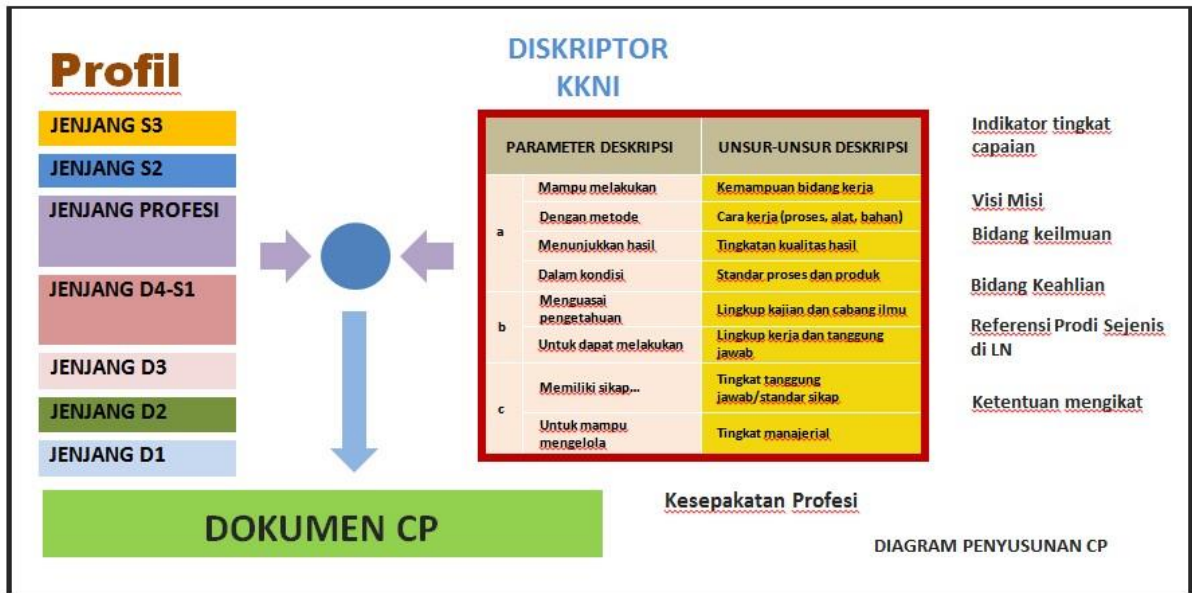
Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup : sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap diskriptor generik KKNI.

Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing. Bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil.

Profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pernyataan CP program studi. Satu program studi setidaknya memiliki satu profil, sangat umum bahwa satu program studi memiliki lebih dari satu profil. Berapa jumlah profil maksimum dapat diperkirakan dengan merujuk pada jenjang pendidikan diperbandingkan dengan diskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki jumlah profil lebih banyak.

3.8 Alur Menyusun Pernyataan CP

Profil yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam menyusun pernyataan CP. Metode paling sederhana dalam menyusun profil adalah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur-unsur CP. Tip sederhana dalam menyusun CP dari profil yang ada adalah dengan pola fikir berikut: profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan, sedangkan CP adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil tersebut.



Gambar 3.8 Tahapan Penyusunan CP

Diagram di atas menunjukkan alur penyusunan CP yang diturunkan dari profil dengan menguraikan kedalam unsur-unsur deskripsi pada KKNi.

Perumusan CP dengan menguraikan kedalam unsur KKNi harus juga memasukkan komponen lain yakni :

- Indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik KKNi;
- Visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai;
- Bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur;
- Bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentikasi secara teliti;
- Kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyusun CP yang direncanakan;
- Referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai pembanding jika ada;
- Peraturan yang ada;

h. Kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.

3.9 Rujukan Penyusunan Capaian Pembelajaran

Pengembang kurikulum dapat menetapkan tujuan pembelajaran secara lebih spesifik jika menggunakan taksonomi pembelajaran untuk menyiapkan perencanaan desain pembelajaran sampai perlengkapan evaluasinya. Selama dekade ini, telah dikenalkan 3 (tiga) model besar taksonomi, yaitu mulai dari Bloom (1956), Anderson dan Krathwol (2002) dan terakhir adalah taksonomi belajar Marzano (2009). Penyusun kurikulum dan rancangan pembelajaran dapat memilih model taksonomi yang ada. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekhasan.

BAB 4

PENYUSUNAN MATA KULIAH

4.1 PENETAPAN KELUASAN DAN KEDALAMAN PENGETAHUAN

Di dalam menetapkan keluasan materi, mata kuliah yang harus dirujuk adalah CP yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran dan kedalaman pengetahuan harus diperhatikan cakupan materi. Secara praktis, penyusun kurikulum dapat menentukan materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai CP. Materi/bahan kajian yang dipilih tersebut akan menghasilkan informasi secara lengkap mengenai keluasan materi/kajian sebuah mata kuliah. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. Di bawah ini akan disampaikan tabel contoh dari penggunaan analisis dengan menggunakan pertanyaan di atas terhadap sebuah capaian pembelajaran.

Tabel 4.1 Penetapan keluasan materi diturunkan dari capaian pembelajaran (gunakan pertanyaan: untuk mencapai capaian pembelajaran, ilmu apa saja yang diperlukan?)

Kualifikasi KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN	KAJIAN/ILMU/MATERI/POKOK BAHASAN
S-1	<i>Menguasai aplikasi software, teknologi pembelajaran, agar dapat berperan sebagai akademisi dan profesional dalam memecahkan masalah Pendidikan Kewarganegaraan</i>	Konsep kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, teori politik, konsep lembaga Negara, prinsip hubungan interpersonal, hukum privat dan publik, konsep ekonomi, ilmu budaya
S-1	<i>Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan</i>	Konsep pengukuran (psikometri), teori kepribadian manusia, teori perkembangan manusia, teori psikologi sosial, prinsip komunikasi, metodologi penelitian, kode etik

	<i>Kode Etik Psikologi Indonesia</i>	
D-3	<i>Mampu mengidentifikasi, menggunakan, dan memelihara alat uji dan diagnosa untuk melakukan pekerjaan sebagai mekanik ahli sepeda motor</i>	Prisiknosiplogi pegujian kerja mesin, Konsep kerja mesin/engine, konsep pemindahan energi, system rem, system penerangan, system rangka dan suspense.
D-4	<i>Mampu melaksanakan kegiatan fungsi-fungsi bisnis sebagai realisasi gagasan bisnis yang memanfaatkan sumberdaya bisnis secara efektif dan efisien</i>	Ilmu administrasi, prinsip dan konsep bisnis, konsep manajemen sumberdaya, prinsip kualitas dan kontrol, pengelolaan anggaran

Prinsip penting lainnya yang harus diperhatikan adalah prinsip kecukupan (*adequacy*). Kecukupan (*adequacy*) atau memadainya cakupan materi pembelajaran (mata kuliah) juga perlu diperhatikan. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh masing-masing program studi pelaksana. Cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, sesuai dengan kompetensi bidang ilmu spesifik dan juga sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh asosiasi program studi secara nasional.

Setelah mendapatkan berbagai kajian ilmu, program studi juga perlu untuk menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan. Dalam proses penetapan kedalaman materi ini mengacu pada pasal 9 permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 yang telah menetapkan kerangka tingkatannya yang harus diacu. Penetapan ini dipandang perlu, agar di dalam melaksanakan kurikulum pendidikan tinggi nantinya hasil lulusannya dapat distandarkan, tidak terlalu

rendah ataupun melampaui hingga kualifikasi yang jauh di atasnya. Tidak jarang, sebuah program studi menetapkan kedalaman materi di bawah kualifikasi yang seharusnya. Misalnya, lulusan D-IV (sarjana terapan), hanya dituntut untuk menguasai konsep umum sederhana, dihafalkan dan diujikan dalam model pilihan ganda. Dapat dipastikan bahwa hasil lulusannya akan berada di bawah kualifikasi yang distandarkan KKNI. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Kedalaman penguasaan pengetahuan

LEVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	PRODI
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S2
7	Teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	Profesi
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam	S1/D4
5	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum	D3
4	Prinsip dasar bidang pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu	D2
3	Konsep umum pengetahuan dan ketrampilan operasional lengkap	D1
2	Pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik	Lulusan SMA
1	Pengetahuan faktual	

Tabel di atas menunjukkan adanya suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain. Oleh karenanya, untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan sesuai dengan KKNI, penguasaan keluasaan dan kedalaman pengetahuan ini harus dicapai secara kumulatif dan integratif. Di dalam Pasal 9 ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa ***Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.*** Dalam hal ini pada program studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu

untuk melakukan desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang. Sebagai contoh, program studi teknik elektro perguruan tinggi A menyelenggarakan dari strata S-1, S-2 dan S-3, maka dalam menetapkan tingkat kedalamannya harus berkelanjutan dan integratif.

Semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut dikemas dalam bentuk mata kuliah. Oleh karena itu, mata kuliah ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari program studi lain yang sejenis. Dengan demikian, terbentuklah mata kuliah tersebut yang berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai.

4.2 PENGERTIAN STANDAR ISI

Pengertian dari standar isi, sebagaimana yang tertuang di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 8 ayat (1) adalah ***kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran***. Tingkat kedalaman serta keluasan dalam definisi ini merujuk pada CP yang ditetapkan. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya. Sementara keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pasal 8 ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menjelaskan bahwa ***Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat***.

Oleh karenanya, untuk dapat mewujudkan CP yang sesuai dengan bidang ilmu serta kualifikasi KKNi, suatu program studi perlu mendesain secara integratif antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulumnya. Pemetaan kajian dalam kurikulum untuk dapat dikembangkan dan atau dikupas dalam sebuah penelitian, akan menjadi kekuatan tersendiri bagi program studi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selanjutnya pada

paparan di bawah ini akan disampaikan secara lebih rinci mengenai metode dan ketentuan dalam menetapkan keluasan materi maupun kedalamannya.

4.3 PENETAPAN BEBAN BELAJAR MATA KULIAH DAN SKS

Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaannya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai” dari deskripsi CP program studi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati oleh forum program studi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta perkiraan besarnya beban sks. Matriks rumusan CP dan bahan kajian (Tabel 4.3) dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara kompetensi dengan bahan kajian menjadi lebih jelas, artinya tidak ada bahan kajian yang tidak terkait dengan CP yang akan dicapai. Di sisi lain dengan menggunakan matriks ini dapat diketahui asal munculnya matakuliah beserta besarnya sks.

Tabel 4.3 Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CP Lulusan

No	CONTOH PEMBENTUKAN MATA KULIAH	BAHAN KAJIAN												
		Inti Keilmuan				IPTEKS pendukung		IPTEKS Pelengkap		Yang dikemb		Untuk ms depan	Giri PT	
		Desain ars.	Teori, Metode	Struktur bang.	Seni	Perencanaan	Perk. Ars	Sains, Arsitek	Lansekap Ars	Interior	Permukiman	Ars Nusantara	CAD	Strategi Pemb
	Capaian Pembelajaran													
1	Kemampuan merancang arsitektur			Mata Kuliah										
2	Kemampuan mengkomunikasikan ide			A										
3	Kemampuan bekerjasama													
4	Memiliki kepekaan masalah nyata													
5	Kemampuan membaca gambar													
6	Memiliki kemampuan managerial & leadership													
7	Mempunyai kemampuan dasar praktek													
8	Kemampuan belajar sepanjang hayat													
9	Berfikir & berkomunikasi secara akademis & etis													
10	Kemampuan mengembangkan arsitektur													
11	Menjunjung tinggi norma akademik													
12	Memiliki penget, strategi pembangunan													

Pembentukan sebuah mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis keterdekatan bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, dan dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat. seperti contoh pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Contoh Penetapan Mata Kuliah berdasarkan Matriks Hubungan antara kompetensi lulusan dengan bahan kajian.

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (<i>LEARNING OUTCOMES</i>)	BAHAN KAJIAN							
	Ilmu Gizi	Ilmu Pangan	Biomedik	Ilmu Sosial	Humaniora	Manajemen	Komunikasi	
Mampu merancang dan melaksanakan pelayanan gizi								
Mampu mengembangkan pelayanan gizi								
Mampu beradaptasi dalam menghadapi masalah gizi								
Mampu memformulasi kebijakan gizi untuk klien								
Mampu berkomunikasi secara efektif								
Mampu mengidentifikasi, memformulasi					m			
Memiliki kemampuan belajar yang terstruktur								
Memiliki kemampuan berfikir (meta kognitif)					k			
Mampu melakukan penelitian bidang gizi								
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu gizi								
Menguasai konsep manajemen gizi					B			
Mampu bekerja sama dalam tim								

Pada tabel di atas tampak banyak alternatif dalam membentuk mata kuliah. Mata kuliah A dan mata kuliah C merupakan integrasi dari berbagai ilmu yang bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan yang komprehensif karena dipelajari dalam satu bungkus mata kuliah. Tetapi memungkinkan dibentuk mata kuliah B yang membahas satu bahan kajian untuk mencapai berbagai CP.

Dari contoh pembentukan mata kuliah seperti di atas, merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan yaitu : (a) Adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (b) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) Adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi, sehingga suatu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah kumpulan serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh suatu program studi.

Pasal 15 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf (d), dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Untuk menetapkan besaran sks sebuah mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Menurut Betts & Smith (2005) dalam buku *Developing the Credit-based Modular Curriculum in Higher Education*, salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum dengan sistem kredit adalah beban kerja yang diperlukan mahasiswa dalam proses pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dasar pemikiran penetapan satuan kredit ini adalah *equal credit for equal work philosophy*. Oleh sebab itu diperlukan perhitungan terhadap beban mata kuliah yang akan dipelajari. Beban mata kuliah ini sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Setelah mendapatkan beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka dapat dihitung satuan kredit persemesternya dengan cara memperbandingkan secara proporsional beban mata kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total suatu program studi yang ditetapkan (misalnya untuk program S1 dan D-IV minimal beban sks sebesar 144 sks). Dalam paradigma pengembangan kurikulum ini, besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari ; (c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam pasal 17 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa 1 sks :

- Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur setiap minggunya;
- Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup tatap muka, 100 menit dan 70 menit tugas mandiri setiap minggunya;
- Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Berdasarkan pengertian di atas maka bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada. Pasal 17 ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 juga menekankan bahwa setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks. Selain itu pada Pasal 15 ayat (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu. Proses penetapan sks yang akan disajikan dalam struktur kurikulum perlu mempertimbangkan kekuatan lama belajar mahasiswa.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 bahwa masa studi dan beban belajar sebagai berikut:

- a. program diploma satu: masa studi paling lama 2 (dua) tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks
- b. program diploma dua: masa studi paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
- c. program diploma tiga: masa studi paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- d. program sarjana/sarjana terapan/diploma empat: masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
- e. program profesi: masa studi paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;

- f. program magister/program magister terapan/program spesialis: masa studi paling lama 4 tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan
- g. program doktor/program doktor terapan/program sub spesialis: masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

(2) Desain kurikulum

- a. 6 semester untuk program diploma tiga
- b. 8 semester untuk program diploma empat dan program sarjana;
- c. 2-4 semester untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- d. 3-4 semester untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- e. 6 semester untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

4.4 KETENTUAN KHUSUS KURIKULUM IIB DARMAJAYA

Dalam penyusunan kurikulum program studi di Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Komposisi SKS suatu program studi terdiri atas minimal 60% SKS untuk Mata Kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% untuk Mata Kuliah muatan penciri universitas, fakultas, dan program studi.
2. Mata Kuliah wajib disuatu program studi sarjana terdiri atas:
 - a. MK wajib nasional adalah Pendidikan Agama 2 sks, Bahasa Indonesia 2 sks, Pendidikan Pancasila 2 sks dan Kewarganegaraan 2 sks
 - b. Mata kuliah wajib Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya adalah Praktek kerja Pengabdian Masyarakat 4 sks, Bahasa Inggris 2 sks, Technopreneurship 4 sks, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah 2

sks, Character Building 2 sks, Agama 2 sks, Kajian Agama 2 sks, Pengembangan Bisnis 2 sks, Kerja Praktek 2 Sks.

- c. Mata Kuliah wajib fakultas minimal 2 sks
3. Mata Kuliah wajib disuatu program studi Diploma-III terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah wajib nasional adalah Pendidikan Agama 2 sks, Bahasa Indonesia 2 sks, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 sks.
 - b. Mata Kuliah wajib Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya adalah Bahasa Inggris 2 sks, Kerja Praktek 2 Sks, Character Building 2 sks, Technopreneurship 4 sks, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah 2 sks.
 - c. Mata Kuliah wajib fakultas minimal 2 sks
4. Mata Kuliah wajib Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya program studi Pasca sarjana (Doktor) adalah Filsafat Ilmu 3 sks, Metodologi Penelitian 3 sks.
5. Mata kuliah wajib Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya program studi Pasca sarjana (Magister): Metode Penelitian 3 sks dan Statistika 3 sks, Sistem Informasi Manajemen 3 sks
6. Muatan masing-masing mata kuliah tersebut disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran pada jenjang KKNi program studi.
7. Mata Kuliah konsentrasi atau bidang peminatan di setiap program studi yang wajib diambil tidak boleh melebihi 40% dari total sks kelulusan.

4.5 TEKNIK MENYUSUN KODE MATA KULIAH

Kode mata kuliah terdiri dari delapan karakter, dimana tiga karakter pertama dalam bentuk huruf menyatakan kode prodi, fakultas, atau universitas dan lima karakter selanjutnya dalam bentuk angka menyatakan penomoran mata kuliah.

Kode Huruf (contoh)

- IIB : Mata kuliah universitas
- FIK : Mata kuliah Fakultas Ilmu Komputer
- FEB : Mata kuliah Fakultas Ekonomi Bisnis
- AKT : Mata kuliah Prodi Akuntansi

- SIF : Mata kuliah Prodi Sistem Informasi
 TIF : Mata kuliah Prodi Teknik Informatika
 MAN : Mata kuliah Prodi Manajemen
 MMA : Mata kuliah Prodi Magister Manajemen
 MTI : Mata kuliah Prodi Magister Teknik Informatika

Kode Angka { Contoh: SIF15407 }

Dua Digit pertama kode angka menunjukkan posisi mata kuliah pada tahun kurikulum, misalnya:

- **15**407 Angka **15** menunjukkan kurikulum tahun 2015.
 Satu Digit ketiga menunjukkan jumlah SKS, misalnya:
- 15**4**07 Angka **4** menunjukan matakuliah memiliki bobot 4 sks.
 Dua Digit terakhir menunjukkan nomor urut mata kuliah tersebut dalam kurikulum, misalnya:
- 154**07** Angka **07** menunjukan matakuliah dengan nomor urut 07.

Semester 3

NO	KODE_MK	MATAKULIAH	SKS		
			SKS	T	P
1	SIF15407	Pemodelan Proses Bisnis	4	4	0
2	SIF15408	Basis Data Terdistribusi	4	4	0
3	SIF15409	Pemrograman Berorientasi Objek	4	2	2
4	SIF15410	Desain Grafis dan Multimedia	4	2	2
5	MAN15447	Statistika	4	4	0
JUMLAH SKS TEORI DAN PRAKTIKUM			20	16	4

Semester 4

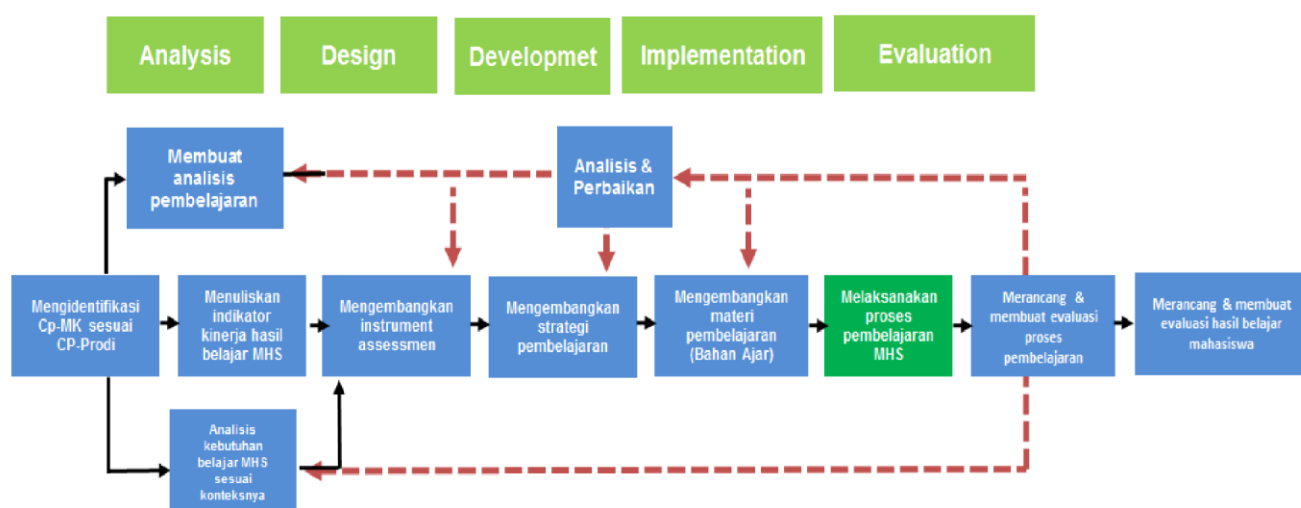
NO	KODE_MK	MATAKULIAH	SKS		
			SKS	T	P
1	TIF15407	Komunikasi Data dan Jaringan	4	2	2
2	SIF15411	Analisis Sistem Informasi Terstruktur	4	4	0
3	SIF15212	Pemrograman Web	2	0	2
4	SIF15413	Sistem Penunjang Keputusan	4	4	0
5	TIF15206	Kecerdasan Buatan	2	2	0
6	IBI15202	Bahasa Indonesia	2	2	0
JUMLAH SKS TEORI DAN PRAKTIKUM			18	14	4

BAB 5

RANCANGAN PEMBELAJARAN

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) atau nama lainnya, disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studinya.

Terdapat beberapa model perancangan pembelajaran, salah satunya adalah Model ADDIE. Model ADDIE adalah salah satu model rancangan pembelajaran yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda (1990). Model ADDIE disusun secara sistimatis dengan menggunakan tahap pengembangan yaitu *analysis*, *design*, *development*, *implementation*, dan *evaluation* yang disingkat dengan ADDIE.



Gambar 6- 1: Model Perancangan Pembelajaran ADDIE & Dick-Carey

Tahapan pengembangan pembelajaran sesuai dengan model gambar di atas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5- 1: Model Perancangan Pembelajaran ADDIE

TAHAPAN		LUARAN
Analysis	Menganalisis masalah-masalah pembelajaran sesuai kebutuhan belajar mahasiswa untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan belajar mahasiswa • Capaian Pembelajaran

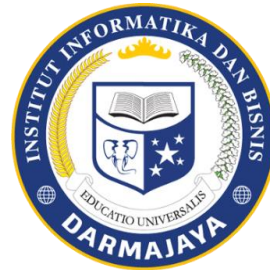
Design	Design merupakan tahapan untuk menentukan indikator, instrumen asesmen dan metode/strategi pembelajaran berdasarkan hasil tahapan analysis.	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator • Instrumen Asesmen • Metode/strategi Pembelajaran • Tugas-tugas
Development	Berdasarkan tahapan design kemudian pada tahapan development, dikembangkan bahan pembelajaran dan media pengantarannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan Pembelajaran • Media Pengantaran
Implementation	Berdasarkan hasil dari tahapan development, kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran mahasiswa.	Pelaksanaan Pembelajaran Mandiri atau Terbimbing
Evaluation	Berdasarkan pelaksanaan proses pembelajaran kemudian dilakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belajar mahasiswa dalam menggapai capaian pembelajarannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Proses Pembelajaran • Evaluasi Hasil Pembelajaran

Selanjutnya dari hasil perancangan tersebut dituliskan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan butir-butir paling sedikit memuat:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- e. metode pembelajaran;
- f. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- h. daftar referensi yang digunakan.
- i. Pustaka: Daftar referensi yang digunakan.

Tabel 5- 2: Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)



Revisi ke	:	XX (tuliskan nomor revisi GBPP)
Tanggal Berlaku	:	DD-MM-YYYY (Tuliskan tanggal berlaku GBPP, sesuaikan dengan SK Kurikulum yang berlaku)
Dikaji Ulang Oleh	:	Ketua KBK
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Jurusan
Disetujui Oleh	:	Dekan Fak.....

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	GBPP MATA KULIAH	Disetujui oleh :
	Ketua Jur.....		Dekan Fak.....
		(Tuliskan Nama Mata Kuliah)	
(.....)	(.....)		(.....)

Kode Mata Kuliah :
Mata Kuliah :
Jumlah Kredit : SKS
Semester :
Prasyarat : -
Standar Kompetensi : (Tuliskan Standar Kompetensi.....)

1	2	3	4	5	6	7	8
No - Pe rt	Kompetensi Dasar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Pustaka
1	(tuliskan kompetensi dasar yang akan diperoleh mahasiswa)	Materi Pokok 1. Uraian 1 2. Uraian 2 3. Dst...	1. aaaaaaa 2. bbbbbb 3. dst...	Mahasiswa mampu : 1. aaaaaaaaa aaa 2. bbbbbbb bbbbbb bbb 3. dst...	<ul style="list-style-type: none"> • aaaaaaa • bbbbbb • dst... 	tuliskan jumlah tatap muka dan durasi tiap tatap muka)	Tuliskan pustaka yang dijadikan reff untuk pertemuan tersebut
x							
8	Ujian Tengah Semester (UTS)						
x							
16	Ujian Akhir Semester (UAS)						

Daftar Pustaka :1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Tabel 5- 3: Penjelasan pengisian RPS

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN PENGISIAN
1	No. Pertemuan	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).
2	Kompetensi Dasar	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (<i>hard skills & soft skills</i>). Merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat mencapai kompetensi mata kuliah ini diakhir semester.
3	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Bisa diisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau topik bahasan (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan).
4.	Pengalaman Belajar	Model pembelajaran yang dipilih (Misal: PBL, Inquiry Learning, dll), Metode (misal: ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapang, praktek bengkel, survai lapangan,bermain peran,atau gabungan berbagai bentuk. Pendekatan (misal: kontekstual, lingkungan, dll) Penetapan strategi pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan di atas akan tercapai dengan strategi pembelajaran tersebut.
5.	Alokasi Waktu	Takaran waktu yang menyatakan beban belajar dalam satuan sks (satuan kredit semester). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
6.	Indikator	Berisi indikator yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (dapat bersifat kualitatif misalnya ketepatan analisis, kerapian sajian, kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga kuantitatif misalnya jumlah kutipan acuan/ unsur yang dibahas, kebenaran hitungan, dll).
7.	Penilaian	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian kompetensi mata kuliah ini.
8.	Pustaka	Berisi daftar pustaka yang dijadikan reff untuk pertemuan tersebut

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PEMUTAKHIRAN KURIKULUM

6.1. METODE PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

6.1.1 Prinsip Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Prinsip Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Kurikulum adalah sebagai berikut.

- (1) Berbasis evaluasi diri;
- (2) Integritas dan tanggung jawab
- (3) Meningkatkan mutu pengembangan
- (4) Meningkatkan profesionalisme program studi dan dosen;

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran kurikulum diawali dengan tim pelaksana (QAC) membuat instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perkuliahan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ini diwujudkan dalam laporan kegiatan. Laporan Kegiatan didukung oleh semua bukti pendukung. Laporan Kegiatan kemudian diserahkan kepada Rektor IIB Darmajaya. Rektor melakukan rapat dengan Wakil Rektor I serta semua Dekan dan Ketua Program Studi untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil Monitoring dan Evaluasi. Fakultas dan Program Studi yang kurang tepat dalam pelaksanaan proses Perkuliahan perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari Rektor dan Wakil Rektor I atau Dekan agar pelaksanaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang. Aktivitas ini diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme dosen, Program studi, dan fakultas yang bersangkutan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

6.1.2 Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan setiap tahun.

Tabel 1. Mekanisme Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum IIB Darmajaya

No.	Kegiatan	PIC
1	Pengiriman Surat Perintah Tugas Kegiatan Monev Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Rektor
2	Perancangan instrument Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Tim QAC
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Tim Monev (QAC, GKM)
4	Pengumpulan dan pengolahan data hasil Monitoring dan Evaluasi	Tim Monev (QAC, GKM)
5	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Tim Monev (QAC, GKM)
6	Pengiriman Laporan ke Rektor IIB Darmajaya	Tim QAC

6.1.3 Aspek yang Dievaluasi

Aspek yang dievaluasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi mencakup 6 (enam) indikator penilaian; monitoring dan evaluasi pembelajaran mencakup 11 (sebelas) indikator penilaian, dan suasana akademik mencakup 2 (du) indikator penilaian.

6.1.4 Analisis Data

Data hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik secara manual menggunakan Microsoft Excell.

6.1.5 Kualifikasi Penilaian

Data yang telah dianalisis selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan Range berikut ini :

Tabel 2. Range Penilaian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Range Nilai	Konversi Angka Mutu Kualifikasi
≤ 2.00	Perbaikan menyeluruh dan mendesak
2.01-3.00	Perbaikan Mayor
3.01-4.00	Perbaikan minor
4.01-5.00	Cukup
5.01-6.00	Baik
6.01-7.00	Sangat Baik

6.2. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

IIB Darmajaya melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi, pembelajaran dan suasana akademik dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM). Komitmen untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan diwujudkan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun. Kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum mulai dilakukan pada tahun 2016.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi, pembelajaran dan suasana akademik meliputi:

- a. Pengumpulan data/ informasi yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum program studi, pembelajaran dan suasana akademik yang tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut dengan cara pengisian instrument money;
- b. Memonitor pelaksanaan pengembangan kurikulum program studi, pembelajaran dan suasana akademik;
- c. Pelaporan hasil pelaksanaan pengembangan kurikulum program studi, pembelajaran dan suasana akademik;
- d. Pelaporan kemajuan hasil pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
- e. Pelaporan kendala dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik.

6.3 Instrument Monitoring dan Evaluasi

1. PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bobot	1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum di IIB Darmajaya
7	Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala kurang atau setiap 5 tahun.
6	Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
5	Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, tetapi tidak terdapat pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
4	Terdapat dokumen tentang kebijakan, tetapi tidak terdapat peraturan dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
3	Terdapat kebijakan tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, tetapi belum dituangkan dalam bentuk dokumen formal, misalnya SK Rektor.
2	Terdapat kebijakan tidak tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
1	Tidak terdapat kebijakan tertulis maupun tidak tertulis tentang penyusunan dan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.

Bobot	1.2. Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum di IIB Darmajaya
7	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan 6 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) asosiasi profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan.
6	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan 5 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) asosiasi profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan.
5	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan 4 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen,

	(2) mahasiswa, (3) alumni, (4) asosiasi profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan
4	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan 3 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) asosiasi profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan
3	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan 2 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) asosiasi profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan
2	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan 1 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) asosiasi profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan
1	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh ketua program studi saja.

Bobot	1.3.Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum
7	Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum yang diperbaharui secara berkala, disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan
6	Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan
5	Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang tidak ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.
4	Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi tidak diperbaharui secara berkala, tidak disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang tidak ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.
3	Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi tidak diperbaharui secara berkala dan tidak dianalisis serta tidak ditindaklanjuti.
2	Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum yang masih berupa draf dan belum lengkap.
1	Tidak terdapat pedoman dan dokumen monitoring serta evaluasi pengembangan kurikulum program studi.

Bobot	1.4. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi
7	Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program studi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis.
6	Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program studi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum namun kurang sistematis.
5	Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program studi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum tetapi tidak sistematis.
4	Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program studi yang lengkap namun belum ada rencana implementasi kurikulum.
3	Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program studi namun tidak lengkap.
2	Tidak terdapat dokumen tertulis yang menyatakan kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program studi.
1	Tidak terdapat kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program studi.

Bobot	1.5. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS Bidang Pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
7	Terdapat dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala.
6	Terdapat dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum tetapi tidak secara berkala.
5	Terdapat dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat, namun tidak ada mekanisme penyesuaian kurikulum.
4	Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum c u k u p sesuai dengan Perkembangan IPTEKS bidang pendidikan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3	Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS bidang pendidikan tetapi kurang lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2	Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
1	Tidak terdapat dokumen yang mendasari pengembangan kurikulum.

Bobot	1.6. Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Program Sarjana (S-1)
7	Beban belajar mahasiswa 144 – 160 SKS.
6	Beban belajar mahasiswa lebih dari 160 SKS.
5	Beban belajar mahasiswa 134 – 143 SKS.
4	Beban belajar mahasiswa 124 – 133 SKS.
3	Beban belajar mahasiswa 114 – 123 SKS.
2	Beban belajar mahasiswa 104 – 113 SKS.
1	Beban belajar mahasiswa kurang dari 104 SKS.

2. PEMBELAJARAN

Bobot	2.1. Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
7	Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh program studi dan institusi di dalam dan luar negeri secara berkesinambungan.
6	Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh program studi dan institusi lain di dalam dan luar negeri.
5	Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh program studi dan institusi lain di dalam negeri.
4	Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan oleh program studi.
3	Terdapat unit yang mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran, tetapi hasilnya belum dimanfaatkan oleh program studi sendiri.
2	Terdapat rencana pengembangan unit yang melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang terdokumentasi.
1	Tidak terdapat unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.

Bobot	2.2. Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya
7	Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, syarat kelulusan, dan pemanfaatan beragam sumber belajar, yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor, dan dievaluasi secara formatif dan sumatif secara berkala, serta pemanfaatannya bagi peningkatan mutu pembelajaran.
6	Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, syarat kelulusan, dan memanfaatkan beragam sumber belajar, yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor, dan dievaluasi secara formatif, namun belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran.
5	Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan syarat kelulusan, namun monitoring dilaksanakan secara konsisten tetapi belum dievaluasi, serta belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran.
4	Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan syarat kelulusan, namun monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan secara konsisten, serta belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran.
3	Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan syarat kelulusan, namun monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan.
2	Terdapat rencana pengembangan sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan syarat kelulusan.
1	Tidak terdapat sistem pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran.

Bobot	2.3.Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran
7	Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan terus-menerus.
6	Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten.
5	Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, namun pelaksanaannya belum secara konsisten.
4	Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, namun belum dilaksanakan.
3	Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran tetapi belum lengkap.
2	Terdapat rencana penyusunan pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
1	Tidak terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.

Bobot	2.4. Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa
7	Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi Pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa yang diimplementasikan pada program studi dengan evaluasi secara berkala.
6	Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter

	mahasiswa yang diimplementasikan pada program studi dengan evaluasi tetapi belum dilakukan secara berkala.
5	Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa yang diimplementasikan pada program studi tetapi belum dievaluasi.
4	Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa tetapi belum diimplementasikan pada program studi.
3	Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa program studi tetapi belum dilengkapi dengan rancangan implementasinya.
2	Terdapat rencana penyusunan kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa.
1	Belum terdapat penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa.

Bobot	2.5. Persentase penerapan metode pembelajaran yang mempergunakan pendekatan student-centered learning dari seluruh program studi
7	85-100% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan student centered learning.
6	70-84% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan student centered learning.
5	50-69% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan student centered learning.
4	30-49% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan student centered learning.
3	10-29% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan student centered learning.
2	10% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan student centered learning.
1	Tidak terdapat metode pembelajaran yang secara khusus dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Bobot	2.6. Peran serta tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu dari luar perguruan tinggi sendiri untuk peningkatan mutu pembelajaran.
7	Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik di dalam maupun luar negeri secara terprogram setiap tahun.

6	Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri tetapi belum terprogram setiap tahun.
5	Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri dalam 2 tahun terakhir.
4	Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri dalam 3 tahun terakhir.
3	Rencana peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri yang terdokumentasi.
2	Rencana peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran dari dalam negeri yang terdokumentasi.
1	Belum pernah melibatkan tenaga ahli/pakar baik dari dalam maupun luar negeri.

Bobot	2.7. Pelaksanaan perkuliahan teori untuk mengembangkan kompetensi professional
7	Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri yang terjadwal.
6	Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur yang terjadwal, dan tugas mandiri tidak terjadwal.
5	Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka terjadwal, tugas terstruktur, dan tugas mandiri tidak terjadwal.
4	Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka terjadwal, tugas terstruktur tidak terjadwal, dan tanpa tugas mandiri.
3	Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka terjadwal dan tugas mandiri tidak terjadwal, dan tanpa tugas terstruktur.
2	Perkuliahan dilakukan hanya dalam bentuk tatap muka yang terjadwal.
1	Perkuliahan dilakukan hanya dalam bentuk tatap muka tidak terjadwal.

Bobot	2.8. Pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah yang memerlukan praktikum.
7	Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan asisten dan dosen.
6	Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan dosen
5	Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan asisten/laboran/teknisi dengan refleksi.
4	Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan asisten/laboran/teknisi tanpa refleksi.

3	Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio tanpa bimbingan.
2	Perkuliahan praktek dilakukan tidak di laboratorium /bengkel/ studio.
1	Perkuliahan praktek tidak dilakukan.

Bobot	2.9. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran
7	ICT digunakan dalam bentuk: (1) e-learning, (2) sumber belajar, (3) media pembelajaran yang dibuat sendiri, (4) media pembelajaran yang di unduh, (5) media komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa, (6) penyelesaian tugas.
6	Ada lima diantara enam pemanfaatan ICT diatas.
5	Ada empat diantara enam pemanfaatan ICT diatas.
4	Ada tiga diantara enam pemanfaatan ICT diatas.
3	Ada dua diantara enam pemanfaatan ICT diatas.
2	Ada satu diantara enam pemanfaatan ICT diatas.
1	Tidak ada pemanfaatan ICT diatas.

Bobot	2.10. Review sejawat terhadap setiap materi dan proses perkuliahan
7	Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala setiap semester
6	Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala setiap tahun.
5	Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala setiap dua tahun.
4	Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala setiap tiga tahun.
3	Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala lebih dari empat tahun.
2	Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala lebih dari lima tahun.
1	Tidak dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala.

Bobot	2.11. Penggunaan perangkat pembelajaran
7	91%-100% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan.
6	81%-90% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan.
5	71%-80% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan.
4	61%-70% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan.

3	51%-60% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan.
2	41%-50% dosen menggunakan RPS, bahan ajar dan media yang relevan.
1	Kurang dari 40% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan.

LAMPIRAN

Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Informatika Dan Bisnis (IIB) Darmajaya

Lampiran 1. FORMAT “KURIKULUM PROGRAM STUDI”

Cover

Kata Pengantar (Dekan)

SK Rektor

Tim Penyusun (sesuai SK Rektor)

Daftar Isi (termasuk Daftar Lampiran)

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab 1. Pendahuluan

(maksimal 2 lembar, secara ringkas juga diuraikan proses/mekanisme penyusunan kurikulum dan pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak eksternal termasuk asosiasi keilmuan dan pengguna lulusan)

Bab 2. Profil Program Studi (maksimal 5 lembar)

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan

2.2 Profil Dosen Tetap dan Tidak Tetap (jika ada) dan Tenaga Kependidikan

2.3 Profil Sumber Pembelajaran (Laboratorium, Perpustakaan, Teknologi Informasi, dll)

2.4 Profil Layanan Kemahasiswaan (Himpunan, UKM, fasilitas asrama, olahraga, seni)

Bab 3. Ketentuan Akademik

(minimal sama dengan ketentuan akademik fakultas, dan dapat ditambah ketentuan lain sesuai karakteristik atau kebutuhan program studi selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di IIB Darmajaya)

- Pengertian dasar sistem kredit semester
- Nilai kredit semester dan beban studi
- Perkuliahan
- Sistem evaluasi hasil belajar dan batas waktu studi
- Bimbingan akademik dan asistensi
- Administrasi akademik
- Pengendalian Proses Pembelajaran

Bab 4. Kurikulum

4.1 Profil Lulusan

4.2 Capaian Pembelajaran dan Kompetensi (utama, pendukung dan lainnya)

4.3 Keterkaitan Mata kuliah/bahan kajian dengan Capaian Pembelajaran (bagian ini dapat juga ditempatkan pada lampiran)

4.4 Komposisi kurikulum (sks menurut kelompok kompetensi dan pengelompokan lain sesuai karakteristik program studi, dan perlu diperhatikan bahwa sks mata kuliah

pilihan/peminatan/ konsentrasi yang harus diambil tidak boleh melebihi 40% dari total sks kelulusan)

4.5 Distribusi Mata Kuliah Per Semester

4.6 Deskripsi Mata Kuliah

Bab 5. Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran

Lampiran 1. Daftar Dosen Tetap Program Studi (Nama Lengkap, NIK/NIDN, Pangkat, Jabatan Akademik, Kompetensi).

Lampiran2. Matrik Keterkaitan Mata Kuliah dan Elemen Kompetensi Pendidikan Tinggi (Keputusan MENDIKNAS No. 232/U/2000).

Lampiran 3. Diagram Alir Mata Kuliah.

Lampiran 4. Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (2 buah, yang mewakili mata kuliah inti) dan merujuk pada ayat (3) pasal 12 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015)

Lampiran 5. Daftar Ekuivalensi Mata Kuliah

Lampiran 2. Deskripsi KKNi

Jenjang Kualifikasi 6 (S1)	Pengetahuan	1	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
		2	Menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah.
		3	Mempunyai pengetahuan dalam penyusunan algoritma pemrograman yang efektif dan efisien serta dapat merancang, membangun dan mengelola aplikasi sistem informasi secara tepat dan akurat untuk pendukung pengambilan keputusan.
		4	Memiliki pengetahuan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi S1 Sistem Informasi.
	Keterampilan Umum	1-9	Memiliki keterampilan umum program sarjana
		10	Mampu melakukan analisis & desain dengan menggunakan kaidah rekayasa software dan hardware serta algoritma dengan cara menggunakan tools dan dapat menunjukkan hasil dan kondisi yang maksimal untuk aplikasi bisnis.
		11	Memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional untuk pengolahan basis data, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, komputer grafis, dan aplikasi multimedia serta memiliki kemampuan menulis laporan penelitian dengan baik serta mengelola proyek Sistem Informasi, mempresentasikan karya tersebut.
		12	Memiliki kecakapan hidup level program S1.
	Keterampilan Khusus	1	Mampu mengembangkan teori serta metode/teknik pada domain Management and Governance (MAGO)

			atau Informatics Concepts (INCO). (Spesifik pada masing-masing program studi, sesuai dengan profil lulusan dan SDM).
	Sikap	1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
		2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
		3	Dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
		4	Dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.
		5	Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
		6	Dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
		7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
		8	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
		9	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
10		menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	

Lampiran 3. Capaian Pembelajaran Program Studi

No	Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)
1	PLO 1 Mengidentifikasi, memformulasikan dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi
2	PLO 2

	Mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi
3	PLO 3 Menerapkan konsep-konsep dasar komputer yang dibutuhkan dalam merancang dan mengimplemen- tasikan solusi teknologi Informasi
4	PLO 4 Berkarya dengan perilaku etika sesuai bidang keprofesian teknologi informasi
5	PLO 5 Berkomunikasi secara efektif pada berbagai kalangan
6	PLO 6 Melibatkan diri dalam proses belajar terus-menerus sepanjang hidup
7	PLO 7 Bekerja-sama secara efektif baik sebagai anggota maupun pemimpin tim kerja
8	PLO 8 Mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi seorang wirausaha di bidang teknologi informasi

Lampiran 4. Capaian Pembelajaran Perkuliahan

No	Ranah Topik	Capaian Pembelajaran Perkuliahan
1	Matematika dan Statistika	1.1. Menerapkan konsep-konsep probabilitas dan statistik untuk menganalisis data guna mendukung pemecahan masalah 1.2. Menjelaskan konsep dan teori dasar logika dan struktur diskrit untuk mendukung permodelan dan penganalisaan masalah 1.3. Menginterpretasikan dan menyajikan hasil analisis data dalam bentuk dan format yang dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
2	Algoritma dan Pemrograman	2.1 Menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer untuk membantu memecahkan masalah 2.2 Mengidentifikasi beberapa bahasa pemrograman beserta karakteristiknya
3	RPL	3.1 Menjelaskan tahapan pengembangan perangkat lunak.
4	Pengolahan Data & Informasi	4.1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengem- bangan basis data 4.2. Mengidentifikasi dan merancang basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi 4.3. Mengimplementasikan rancangan basis data pada suatu DBMS

		<p>4.4. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari integritas, keamanan dan tingkat kerahasiaan data pada suatu basis data</p> <p>4.5. Memilih teknik dan perangkat data mining untuk membantu dalam pemecahan masalah</p>
5	Arsitektur Komputer	<p>5.1. Menjelaskan arsitektur dasar dari suatu sistem komputer</p> <p>5.2. Mengidentifikasi kebutuhan sistem operasi dari suatu sistem komputer</p>
6	Sistem Terdistribusi	<p>6.1. Mengidentifikasi kebutuhan jaringan dari suatu organisasi</p> <p>6.2. Merancang topologi dari suatu jaringan komputer.</p> <p>6.3. Mengidentifikasi dan menformulasikan kebutuhan keamanan sistem informasi dari suatu organisasi</p>
7	Bisnis dan Manajemen	<p>7.1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dan konsep dasar pengelolaan suatu bisnis organisasi</p> <p>7.2. Mengidentifikasi regulasi, kebijakan dan prosedur bisnis yang berdampak pada implementasi sistem informasi</p> <p>7.3. Menjelaskan bagaimana informasi dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan operasi dan pengendalian suatu bisnis organisasi</p> <p>7.4. Menjelaskan berbagai teknik dan metoda pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah organisasi</p> <p>7.5. Menggunakan ICT untuk mendukung bisnis proses</p> <p>7.6. Melakukan pengukuran kinerja sebuah proses bisnis.</p>
8	Sistem Informasi	<p>8.1. Menjelaskan komponen organisasi, teknologi dan manusia dari sistem informasi</p> <p>8.2. Menjelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kom petitif</p> <p>8.3. Menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi</p> <p>8.4. Mengidentifikasi dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu</p> <p>8.5. Menjelaskan berbagai metodologi pengembangan sistem informasi</p> <p>8.6. Menggunakan berbagai perangkat dan metoda untuk menganalisis aliran dan struktur informasi dalam proses organisasi</p> <p>8.7. Menggunakan UML untuk memodelkan rancangan konseptual dari suatu sistem informasi</p> <p>8.8. Merancang sistem informasi sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design</p> <p>8.9. Menjelaskan pentingnya keterkaitan antara strategi bisnis dan sistem informasi dalam menunjang efisiensi dan efektifitas investasi organisasi</p>

		<p>8.10. Menjelaskan konsep dasar dari pengelolaan proyek sistem informasi (SI)</p> <p>8.11. Menerapkan perangkat dan teknik untuk perencanaan proyek seperti CPM, Gantt Chart, Program Manajemen Project</p> <p>8.12. Mengidentifikasi dan memformulasikan ruang lingkup proyek sistem informasi</p> <p>8.13. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko- risiko proyek, serta menawarkan alternatif solusinya</p> <p>8.14. Menjelaskan aspek-aspek quality assurance pada suatu pengelolaan proyek sistem informasi</p> <p>8.15. Mengaplikasikan konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi</p>
9	Sistem Enterprise	<p>9.1. Menjelaskan dasar-dasar sistem enterprise dan isu-isu dalam penerapannya</p> <p>9.2. Mengevaluasi analisis biaya, manfaat dan risiko dari penerapan sistem enterprise</p> <p>9.3. Menjelaskan bagaimana peranan sistem enterprise dalam mengintegrasikan area fungsional bisnis</p> <p>9.4. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengevaluasi perangkat lunak sistem enterprise</p>
10	Kecakapan Hidup	<p>10.1. Berfikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data.</p> <p>10.2. Mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang berkaitan dengan aspek teknis dan non-teknis.</p> <p>10.3. Memimpin dan bekerja dalam tim, mandiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.</p>

Lampiran 5. CAPAIAN PEMBELAJARAN DARI PROGRAM STUDI

8	Ranah Topik Sistem Informasi	<p>1. Menjelaskan komponen organisasi, teknologi dan manusia dari sistem informasi</p> <p>2. Menjelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif</p> <p>3. Menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi</p> <p>4. Mengidentifikasi dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu</p> <p>5. Menjelaskan berbagai metodologi pengembangan sistem informasi</p>
---	------------------------------	---

		<p>6. Menggunakan berbagai perangkat dan metoda untuk menganalisis aliran dan struktur informasi dalam proses organisasi</p> <p>7. Menggunakan UML untuk memodelkan rancangan konseptual dari suatu sistem informasi</p> <p>8. Merancang sistem informasi sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design</p> <p>9. Menjelaskan pentingnya keterkaitan antara strategi bisnis dan sistem informasi dalam menunjang efisiensi dan efektifitas investasi organisasi</p> <p>10. Menjelaskan konsep dasar dari pengelolaan proyek sistem informasi (SI)</p> <p>11. Menerapkan perangkat dan teknik untuk perencanaan proyek seperti CPM, Gantt Chart, Program Manajemen Project</p> <p>12. Mengidentifikasi dan memformulasikan ruang lingkup proyek sistem informasi</p> <p>13. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko-risiko proyek, serta menawarkan alternatif solusinya</p> <p>14. Menjelaskan aspek-aspek quality assurance pada suatu pengelolaan proyek sistem informasi</p> <p>15. Mengaplikasikan konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi</p>
--	--	--

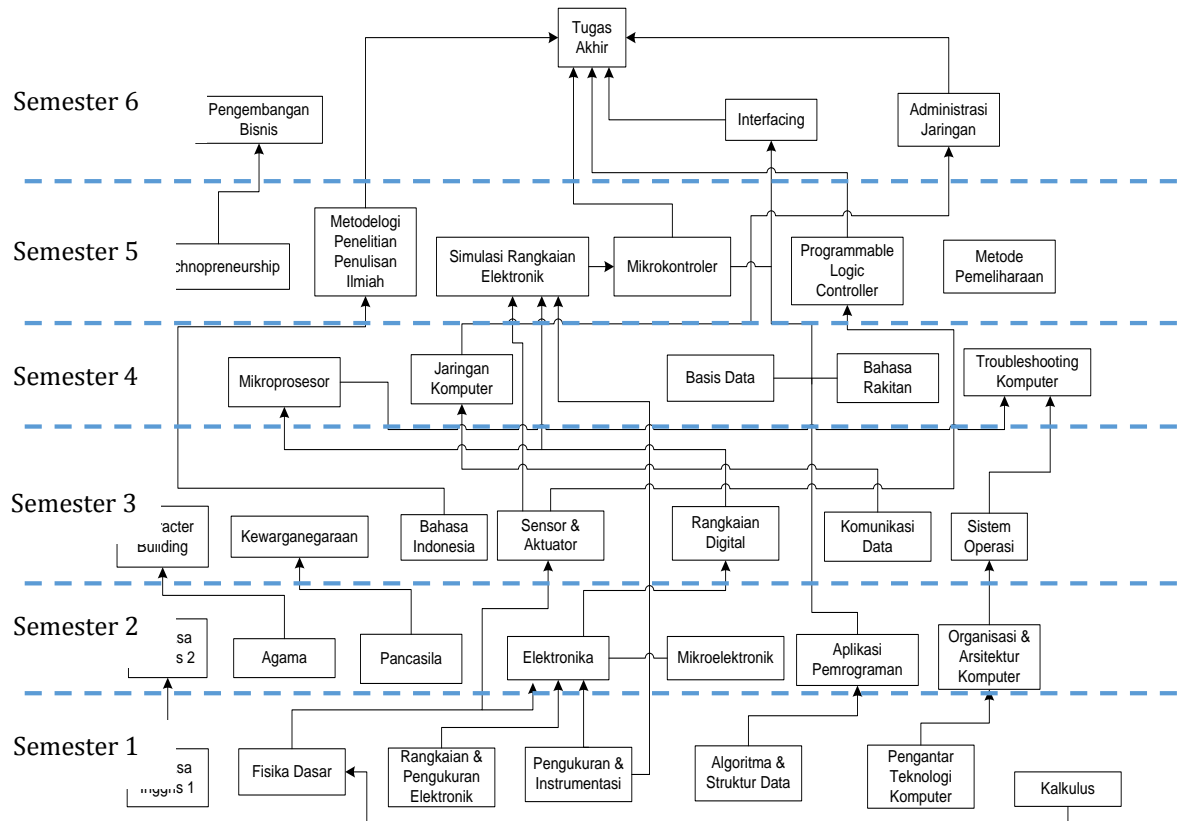
Lampiran 6. Contoh Pemetaan Capaian Pembelajaran Perkuliahan dan Capaian Program Bidang Ilmu

Ranah Topik	Capaian Pembelajaran Perkuliahan	Capaian Pembelajaran Program							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sistem Informasi	8.1. Menjelaskan komponen organisasi, teknologi dan manusia dari sistem informasi	√	√			√			
	8.2. Menjelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif	√	√			√			
	8.3. Menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi	√	√			√			

8.4. Mengidentifikasi dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu	√	√	√					
8.5. Menjelaskan berbagai metodologi pengembangan sistem informasi	√	√			√			
8.6. Menggunakan berbagai perangkat dan metoda untuk menganalisis aliran dan struktur informasi dalam proses organisasi	√	√	√					
8.7. Menggunakan UML untuk memodelkan rancangan konseptual dari suatu sistem informasi	√	√	√					
8.8. Merancang sistem informasi sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design	√	√	√					
8.9. Menjelaskan pentingnya keterkaitan antara strategi bisnis dan sistem informasi dalam menunjang efisiensi dan efektifitas investasi organisasi	√	√	√					
8.10. Menjelaskan konsep dasar dari pengelolaan proyek sistem informasi (SI)	√	√						
8.11. Menerapkan perangkat dan teknik untuk perencanaan proyek seperti CPM, Gantt Chart, Program Manajemen Project	√	√	√					
8.12. Mengidentifikasi dan memformulasikan ruang lingkup	√	√	√					

	proyek sistem informasi								
	8.13. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko- risiko proyek, serta menawarkan alternatif solusinya	√	√	√					
	8.14. Menjelaskan aspek- aspek quality assurance pada suatu pengelolaan proyek sistem informasi	√	√			√			
	8.15. Mengaplikasikan konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi	√	√	√					

Lampiran 7. Contoh Diagram Alir Mata Kuliah
DIAGRAM ALIR PRASYARAT MATAKULIAH PRODI TEKNIK KOMPUTER
IIB DARMAJAYA (KURIKULUM 2015)





DARMAJAYA

SI DARMAJAYA
BRARY & LANGUAGE CE

**INSTITUT INFORMATIKA dan BISNIS
DARMAJAYA**